Otonomi daerah yang diberikan kepada pemerintah daerah di indonesia adalah ; suatu hak yang diberikan kepada pemerintah daerah provinsi ataupun kabupaten untuk dapat mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, termasuk mencari sumber-sumber pendapatan daerah yang bersumber dari potensi yang dimiliki daerah tersebut yang diatur pelaksanaannya baik dalam undang-undang, peraturan daerah dan peraturan bupati yang dijaikan sumber-sumber pendapatan bagi negara atau bagi daerah itu sendiri. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, merupakan pajak yang baru dilimpahkan kepada pemerintah daerah dalam penlaksanaannya sehingga sumber pendapatan yang bersumber dari pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan jika pelaksanaanya dilakukan dengan benar maka menjadi sumber pendapatan bagi Pendapatan Asli Daerah itu sendiri.

 Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang ada di kabupaten malinau, pelaksanaannya masih mengalami kendala-kendala diantaranya yaitu : database PBB-P2 yang belum di UPTADE, belum adanya kegiatan sosilisasi, kualitas dan kuntitas aparaturanya yang masih kurang sehingga pelaksanaan pemungutan terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan belum berjalan dengan baik. Penulis untuk itu tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“ MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KECAMATAN PUJUNGAN KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA’’**. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan induktif, penulis dalam pelaksanaan penelitian mengumpulkan data dengan teknik analisa kualitatif serta menganalisis dan mendiskripsikan berdasarkan fakta-fakta yang ada sehingga menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan teknik wawancara, dan dokumentasi.

 Penelitian yang telah dilakukan penulis di Kecamatan Pujungan berdasarkan landasan teoritis dan legalistik, dapat disimpulkan bahwa di Kecamatan Pujungan mekanisme pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan belum berjalan dengan baik berdasarkan lendasan teoritis dan legalistik sehingga penerimaan pajak yang bersumber dari pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan belum optimal, sehingga perlunya upaya yang dialukan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau untuk mengatasi permasalahan tersebut.

 Regional autonomy given to regional governments in Indonesia is; a right granted to provincial or district governments to be able to manage and manage their own households, including to seek sources of regional revenues derived from the potential of the area which is regulated in the laws, regulations and regulations of the district head sources of income for the state or for the region itself. Land taxes and rural and urban buildings, are newly assigned taxes to local governments in their execution so that sources of income derived from land taxes and rural and urban buildings if their implementation is done properly become the source of income for the Regional Original Income itself.

 Land taxes and rural and urban buildings in Malinau district, the implementation still faces some obstacles such as: UN-P2 database not yet in UPTADE, lack of sosilization activities, quality and lack of its apparatus, Rural and Urban Buildings have not gone well. The authors are interested in conducting research on **"MECHANISM OF EARTH TAX COUNCIL AND BUILDING OF URBAN AND URBAN IN SUB DISTRICT DISTRICT OF MALINAU DISTRICT NORTH KALIMANTAN ''.** This research uses descriptive research method with inductive approach, the author in conducting the research collect data with qualitative analysis techniques and analyze and describe based on existing facts to produce general conclusions. The data collection techniques used are with interview techniques, and documentation.

 The research that has been done by the writer in Pujungan sub-district based on theoretical and legalistic foundation, it can be concluded that in Pujungan District, the mechanism of collection of Land and Rural and Urban Taxes has not run well based on the theoretical and legalistic lateness so that the tax revenue derived from the tax of Earth and Rural Building and Urban has not been optimal, so that the effort that has been applied by local government of Malinau Regency to solve the problem